



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Oleh :

SRI LESTARI
211003631010536

**PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN**

SRI LESTARI
211003631010536

TESIS

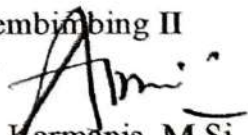
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister
Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan
Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera dibawah ini

Semarang, 5 Juni 2021
Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si
NIDN. 0618056501

Pembimbing II


Dr. Karmanis, M.Si
NIDN. 0605066601

Menyetujui,
Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik


Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si
NIDN. 0618056501

LEMBAR PENGESAHAN



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN**

SRI LESTARI
211003631010536

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister
Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui Tim Penguji dan disahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Semarang, 5 Juni 2021

1. Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si.
Ketua Tim Penguji/Pembimbing
2. Dr. Karmanis, M.Si
Penguji I
3. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si
Penguji II

Ami
Ami
Ami

Mengesahkan,
Dekan FISIP UNTAG Semarang
Rini
Dr. Rini Werdiningsih, M.S.
NIDN. 0621105901



ABSTRAK

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan telah melaksanakan PATEN sebagai pelayanan administrasi publiknya secara terpadu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III yang variabelnya meliputi komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur organisasi, terkait dalam pengumpulan data, penulis melakukannya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis reduksi data, display data dan verification.

Dengan penelitian ini Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang mengaturnya namun belum dapat diimplementasikan dengan baik secara optimal karena 1) masih kurangnya sosialisasi PATEN kepada masyarakat akibatnya masih banyak yang belum memahami tentang PATEN 2) masih kurangnya kualitas dan terbatasnya kuantitas sumberdaya pelaksana teknis PATEN dalam memberikan pelayanan 3) masih kurangnya sarana dan prasarana serta terbatasnya dukungan anggaran dari sumber APBD Kabupaten Grobogan sehingga menghambat dalam pengembangannya 4) dan pada aspek struktur birokrasi sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik karena telah adanya SOP dan Fragmentasi yang jelas.

Kemudian terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, beberapa faktor pendukungnya antara lain adanya 1) Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dalam meningkatkan pelayanan administrasi terpadu, sebab daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan pelayanan di pemerintahan Kecamatan Purwodadi, 3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

Adapun yang menjadi faktor penghambatnya antara lain 1) Terbatasnya fasilitas kerja atau sarana operasional untuk menunjang pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), 2) Beragamnya karakteristik, sikap dan perilaku pegawai yang memungkinkan perbedaan keramahan dalam menghadapi para pemakai jasa, 3) Terbatasnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan PATEN, 4) Terbatasnya kewenangan Camat dalam mengambil kebijakan terutama untuk pengembangannya seiring dengan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadunya di Kecamatan Purwodadi

Kata kunci: pelayanan publik, implementasi kebijakan, PATEN